

"MALAKOK": MULTICULTURAL CONCEPTS BASED ON LOCAL WISDOM IN MINANGKABAU COMMUNITY

Fitri Eriyanti

Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

West Sumatra is one of 34 provinces in Indonesia which has the challenge of cultural pluralism. This is characterized by the diversity of social identities, variation of tribes who live in this area, and the global oriented lifestyle. This opinion can be regarded as a character representation of Indonesian society that is varied ranging from homogeneous, heterogeneous, pluralistic up with multicultural. The variations people often become sensitive to the issue of social harmony. But it is not so in West Sumatra. A study conducted five years ago, with the scope of West Sumatra, is still relevant to discuss here, that is the concept of a multicultural society in the Minangkabau community interacting with other cultures, known as "malakok". This paper will discuss a variety of "malakok" patterns found in the various regions in West Sumatra (Pasaman, Dharmasraya, Solok, and Pesisir Selatan). The finding of this study consisted of the concept of multicultural as a local wisdom in Minangkabau society which is reflected in the socio-cultural of malakok as a means of integration of immigrant communities with indigenous people. The existence of "Malakok" becomes more obvious with the current government policy called "Back to Nagari". This policy is an attempt to revive the traditional leadership role in the system of public administration in Minangkabau.

Keywords: *Malakok; Multicultural Concepts; Local Wisdom.*

A. Pendahuluan

Sumatera Barat merupakan satu dari wilayah Indonesia, yang memiliki unsur-unsur masyarakat yang beragam dari segi suku dan agama. Penduduk asli adalah etnik Minangkabau dan memeluk agama Islam. Menurut data BPS 2015, di Sumatera Barat terdapat beberapa etnis dan agama, dengan mayoritas etnis Minangkabau beragama Islam (98,06%) dan 1.94% beragama lain seperti Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Demikian juga Minangkabau adalah sukubangsa mayoritas, sekaligus sebagai penduduk asli Sumatera Barat. Suku bangsa lain tergolong sedikit dan merupakan pendatang terdiri dari etnis Jawa, Sunda, Batak, Cina, India, dan lain-lain. Kebanyakan pendatang dari Jawa dan Sunda datang ke Sumatera Barat melalui transmigrasi, sedangkan yang lainnya karena faktor ekonomi.

Etnis Minangkabau dikenal juga dengan kebiasaan merantau. Hampir di semua pelosok tanah air ada warga dari etnis Minangkabau. Satu hal yang cukup menarik dari pembauran masyarakat Minangkabau dengan masyarakat dari suku lain hampir tidak pernah terjadi pertikaian antar kelompok (suku atau agama) yang berlarut-larut dan menyisakan dendam yang panjang. Kalaupun ada konflik internal yang terjadi, tidak sampai menjadi konflik panjang dan mendalam dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Ambon, Poso, dan beberapa daerah lain. Karena itu, banyak pengamat menilai bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kawasan yang cukup aman dan damai di Indonesia (Wiranto, 1999; Kompas, 20 Januari 2002:7; Wanandi, 17 Juni 2006).

Fenomena ini merupakan daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih dalam, mengapa masyarakat Sumatera Barat dapat bertahan dalam keragaman tanpa ada konflik antar kelompok yang berlarut-berlarut? Sehubungan dengan ini, pada tahun 2010 yang lalu, kami tim peneliti Universitas Negeri Padang, melalui kegiatan Penelitian Strategis Nasional, melakukan penelitian di enam kabupaten/kota: Kabupaten Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi) mengenai potensi-potensi lokal yang berpengaruh terhadap integrasi dan harmonisasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat. Penelitian itu mengajukan dua pertanyaan besar dalam enam bidang sorotan, yaitu faktor apa yang menjadi potensi konflik dan potensi integrasi dalam masyarakat Sumatera Barat di bidang sosio budaya, kebijakan pemerintah, dan mentalitas. Makalah singkat ini khusus mengungkapkan kegiatan *malakok* sebagai suatu konsep multikultural berbasis kearifan lokal sosio budaya Minangkabau sebagai potensi integrasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan survey dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian adalah kabupaten/kota yang heterogenitas tinggi (suku, agama, daerah pemekaran). Informan penelitian dipilih berdasarkan fungsi atau kedudukannya dalam masyarakat. Fokus penelitian yaitu 1) sosiobudaya; 2) kebijakan pemerintahan lokal; dan 3) mentalitas masyarakat. Teknik pengumpulan data

dengan melakukan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara bertahap (pengumpulan data, pengkategorian, pengkodean kategori, dan interpretasi data).

Kategori (pengelompokan) wilayah penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kategori daerah	Wilayah
Masyarakat heterogen dari segi suku agama dan bahasa, namun masyarakat asli masih kuat memegang adat	Bukittinggi, Kenagarian Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
Masyarakat heterogen dengan masyarakat Minangkabau yang longgar dalam memegang adat. Masyarakat menggunakan adat yang disebut nasional	Kampung Jambak dan Kenagarian Simpang Ampek Kabupaten Pasaman, Desa Sikalang Kecamatan Talawi Sawahlunto, dan Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Sawahlunto
Masyarakat heterogen dalam komunitas sendiri, tetapi di kelilingi masyarakat Minangkabau yang teguh dengan adat istiadat	Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya
Masyarakat homogen yang memegang adat istiadat Minangkabau	Kabupaten Solok dan Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan, Desa Salak dan Rantih Kabupaten Sawahlunto, Kenagarian Sasak dan Kotobaru Kabupaten Pasaman.

C. Kajian Teori

1. Konsep Masyarakat Multikultural

Dalam Wikipedia (www.en.wikipedia.org/2005) dijelaskan pengertian multikulturalisme sebagai kebijakan publik untuk mengelola keragaman dalam masyarakat multi-etnik dan menekankan perlunya, dalam satu negara, saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan dalam masyarakat. Pengertian dalam ensiklopedia ini dilihat dari sudut negara dan kebijakan yang dibuat oleh negara, disebut juga dengan *official multiculturalism*. Namun multikulturalisme juga memiliki makna dari sisi normatif yakni sebagai prinsip atau norma.

Ada ahli yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai pola pikir yang menuntut kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, gender, dan agama (A1 Muchtar, 2004:6). Konsep ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan

multikulturalisme sebagai ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus dengan kebudayaannya (Suparlan, 2002).

Di kalangan ahli teori sosiologi istilah multikultural merupakan wacana yang diperdebatkan, apakah multikultural itu sebuah realitas atau teori tentang realitas (Ritzer and Smart, 2011). Nampaknya persoalan itu terkait dengan ketidakjelasan makna multikultural itu sendiri. Untuk lebih memahami multikultural sebagai sebuah realitas dan juga teori tentang masyarakat majemuk dapat dilihat dari berbagai teori dan contoh realita kehidupan masyarakat yang benuansa multikultural. Setidaknya ada dua penjelasan awal yang dikemukakan di sini yaitu dari perspektif liberal dan perspektif Islam. Dari perspektif Islam, belum ada satu teori yang bisa menjelaskan realitas masyarakat multikultural bahkan banyak juga di kalangan orang Islam di Indonesia sangat menolak paham multikultural yang dianggap merusak tatanan sosial dan nilai kemasyarakatan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, bila dikaji sejarah masyarakat Islam yang pertama di zaman Nabi Muhammad tampak bahwa pola hidup masyarakat yang dibuat oleh Beliau di Madinah, dengan sistem ukhuwwah (persaudaraan), dan ummah (kesatuan bangsa) di bawah satu kesepakatan bersama "Piagam Madinah" merupakan realitas tentang kehidupan sosial yang bersifat multikultural (Moeis, 2014). Setiap orang atau kelompok hidup dengan identitas yang jelas, serta pengakuan hak dan kewajiban masing-masing kelompok dalam hubungan atau interaksi sosial. Setiap perselisihan selalu dikembalikan kepada Allah dan RasulNya (Kitabullah).

Dalam pola masyarakat Madinah, kesepakatan dan ketaatan terhadap kesepakatan didasarkan pada landasan "keimanan yang kuat" dan "akhlak yang mulia". Artinya secara teoritis dapat dijelaskan bahwa masyarakat multikultural ala "Madinah" bisa terwujud apabila setiap individu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah SWT dan RasulNya, yang dimanifestasikan dalam kekuatan ibadah dan kemuliaan akhlak, serta kesetiaan kepada Negara yang disepakati sebagaimana ditetapkan dalam "Piagam Madinah".

Dalam konsep persaudaraan dan umat terdapat pengakuan terhadap identitas masing-masing golongan. Setiap golongan diberi kebebasan untuk beraktivitas sesuai

dengan identitas mereka, dan setiap golongan memiliki loyalitas yang sama untuk menjaga kebersamaan dalam Negara Madinah. Inti multikultural dalam masyarakat Islam Madinah yakni adanya pengakuan identitas, perlindungan terhadap minoritas, dan kesetiaan terhadap kebersamaan.

Tampaknya perdebatan tentang realitas masyarakat multikultural terus bergulir, terutama dari penganut teori kritis karena pertanyaan untuk menjawab kedudukan "identitas" dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, hak dan kewajiban masih terus dipertanyakan. Menurut George Ritzer dan Barry Smart (2011) pertanyaan tentang identitas adalah pertanyaan tentang "siapa aku" yang mungkin mudah disalahgunakan. Tetapi pertanyaan itu harus dijawab. Identitas adalah satu nama abstrak yang disandang manusia dalam mengakui "siapa mereka" dengan konsekuensi pilihan-pilihan yang dibuatnya di antara pilihan-pilihan yang ada, dalam rangka bergaul dengan manusia lain (Taylor, 1994 dalam Ritzer & Smart 2011). Sejalan dengan ini, Watson (2000) menegaskan bahwa dalam masyarakat multikultural ada kehendak untuk menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan "keasingan" orang lain; prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan. Lebih lanjut Watson mengingatkan, bahwa dalam memahami makna multikultural, budaya (*culture*) dipandang sebagai proses dinamis dari adaptasi manusia terhadap perjalanan sejarahnya yang merupakan kondisi untuk mempertahankan kehidupan melalui keterlibatan secara simpatik terhadap cara-cara baru dalam memahami dunia dan meresponnya. Konsep identitas atau diri dalam perspektif ini merupakan sesuatu yang dinamis, dan justru disini letak kekhawatiran penyalahgunaan identitas tersebut.

Pemaknaan identitas merupakan ekspresi dari perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat, yang membawa implikasi lahirnya konsep "pengakuan". Dalam hubungan satu sama lain, setiap orang butuh dikenal sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang diperlakukan secara adil dan sama untuk semua orang. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat multikultural dalam pandangan kritis diukur dari keragaman yang muncul dalam perjuangan politik tersebut (M. Sobary 2003:28). Dalam pandangan ini, makna multikultural mengacu kepada "identitas" dan "pengakuan".

Memang dilematis ketika konsep itu dihadapkan dengan nilai. Dari sisi ini, kalangan yang kontra melihat bahwa multikultural tidak memiliki bentuk, tapi

bagaimanapun dia ada. Dalam perspektif "Piagam Madinah", baik "identitas" maupun "pengakuan" merupakan sesuatu yang sudah jelas karena disepakati sesuai dengan realita yang ada. Kemungkinan, jalan tengah dari perdebatan ini, terletak pada "kemauan mengenali diri dalam "keasingan" dengan orang lain (Watson, 2000). Dari sini lahirnya istilah lain tentang hakekat pribadi (si pemilik identitas) adalah seorang berkarakter matang dengan kemampuan sosial yang dewasa (Moeis, 2014). Dalam tataran ini konsep multikultural merupakan nilai.

Dari dua pandangan di atas, ada kesamaan gagasan tentang multikultural yaitu dalam konsep identitas dan pengakuan. Tetapi ada perbedaan yang prinsip dari kedua ide tersebut. Pada realitas masyarakat Madinah, identitas dan pengakuan merupakan kebijakan politik dari suatu Negara yang diwujudkan oleh individu dalam pergaulan antar golongan. Pada konsep kedua, identitas dan pengakuan adalah perjuangan individu atau kelompok untuk mendapatkan kesetaraan, dan keadilan dalam pergaulan bersama. Selanjutnya, uraian berikut akan membahas fenomena budaya *malakok* di Minangkabau terkait "identitas" dan "pengakuan".

2. Konsep Malakok dalam Perspektif Identitas dan Pengakuan

Dalam kajian sosiologi, belum pernah ada satupun definisi tentang *malakok*. Secara etimologi, *malakok* adalah istilah Indonesia khususnya Minangkabau, yang berarti menempel atau melekat rapat sekali. Dalam bahasa Inggris, *malakok* sama dengan istilah *adhere, cementing social bonds*.

Dari sudut sosiologi, istilah ini mengandung tujuh unsur pokok: 1) menjadi pendatang dan bermukim di lingkungan salah satu suku Minangkabau, 2) dengan kemauan sendiri, 3) secara perorangan atau pun berkelompok, 4) bertujuan untuk menjadi anggota suku, mendapat perlindungan dan keamanan, menjalin ikatan sosial, yang kuat, mendapat perlakuan yang baik, dan adakalanya untuk mendapat hadiah tanah, 5) mengajukan permohonan dan bersumpah untuk taat setia dan menjaga kehormatan suku, 6) mengisi adat menurut persyaratan yang ditetapkan oleh penghulu suku, 7) mengadakan perjamuan atau upacara kenduri untuk seluruh anggota suku (Eriyanti, 2007:19).

Pentingnya *malakok* dalam mewujudkan keharmonisan hubungan telah diungkapkan oleh beberapa peneliti. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsir (2000), Eriyanti (2004), dan Saptono (20045). Sehubungan itu, Taufik Abdullah

(1978) menegaskan bahwa *malakok* merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat membantu mewujudkan keharmonisan antara etnik pendatang dengan etnik tuan rumah maupun antara suku atau pun kaum di kawasan Minangkabau Sumatera Barat.

Malakok adalah suatu konsep yang juga diterapkan di daerah lain, seperti konsep *Berkedim* di Negeri Sembilan Malaysia, konsep *Membeli Marga* yang hidup dalam masyarakat Batak di Provinsi Sumatera Utara, dan konsep *Peuseujuk* pada masyarakat adat Aceh. Kesemua konsep tersebut memiliki tujuan yang hampir sama dengan konsep *malakok*, terutama terkait "identitas" dan "pengakuan" di antara pendatang dan penerima.

Malakok dapat dilakukan oleh pendatang secara perorangan dan dapat pula secara berkelompok. Misalnya, sekelompok etnik Jawa yang bertransmigrasi ke Provinsi Sumatera Barat, mereka dapat *malakok* secara bersama-sama kepada salah seorang penghulu (atau kepada beberapa orang penghulu kalau jumlah transmigran itu banyak) di kawasan pemukiman mereka yang baru itu. Contoh yang lainnya, apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan suatu nagari atau kampung hancur sehingga semua penduduknya terpaksa pindah ke nagari lain, maka mereka *malakok* secara berkelompok kepada penghulu yang sesuku dengan mereka di nagari baru yang mereka datangi.

Pada beberapa nagari, pendatang yang *malakok* secara berkelompok itu ada yang dibuatkan suku baru dan penghulunya dipilih dari anggotanya sendiri. Umpamanya, etnik Batak yang *malakok* secara berkelompok di Kenagarian Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dimasukkan ke dalam lima buah suku dan penghulunya dipilih dari kelompok etnik Batak sendiri, yakni 1) Datuk Rajo Manih sebagai penghulu suku Lubis, 2) Datuk Rajo Lelo sebagai penghulu suku Batubara, 3) Datuk Rajo Mambang sebagai penghulu suku Nasution, 4) Datuk Rajo Manambin sebagai penghulu suku Harahap, 5) Datuk Sutan Paruman sebagai penghulu suku Siregar. Suku dan penghulu baru itu diperlakukan dan dihargai sama kedudukannya dengan suku dan penghulu yang sudah ada di nagari itu (Eriyanti, 2004).

Sehubungan dengan esensi *malakok*, Durkheim (1964) menekankan bahwa masyarakat memerlukan solidaritas dan integrasi sosial untuk menjamin penerusan

hidupnya. Dalam masyarakat tradisional, kedua kepentingan ini dibina oleh struktur sosial, yaitu ada kelompok, ada suku (*clan*), dan ada proses untuk menjadi atau masuk ke dalam suatu struktur, supaya setiap orang berada dalam struktur itu. Bila setiap orang berada dalam struktur sosial maka ia tidak terpisah dari komunitas. Dengan demikian, tidak akan terjadi *anomie*.

Selanjutnya Durkheim menegaskan bahwa semua masyarakat pada umumnya mempunyai kebiasaan, adat istiadat, bahasa dan moral yang sama. Mereka juga tunduk di bawah suatu rangka bidang institusi politik, undang-undang dan ekonomi. Semua hal ini membentuk suatu struktur sosial yang dilestarikan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Individu yang tidak patuh kepada struktur ini akan dikenakan hukuman. Struktur yang mewarnai suatu masyarakat tradisional berdasar kepada kekerabatan, kesukuan, atau keagamaan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa *malakok* merupakan mekanisme untuk mengukuhkan struktur sosial. Apabila para pendatang *malakok* kepada masyarakat tuan rumah berarti mereka memasuki struktur sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat tuan rumah. *Malakok* memungkinkan pendatang diterima ke dalam struktur sosial Minangkabau. *Malakok* merupakan suatu institusi tradisional yang dapat menjadikan pendatang menyesuaikan diri kepada sistem yang berlaku di tempat mereka bermukim, dalam membentuk dan mempererat hubungan dengan masyarakat tempatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen (1997:35) yang mengemukakan bahwa para pendatang perlu menyesuaikan diri kepada permintaan suatu sistem dimana mereka bermukim, baik karena disebabkan nasib, keadaan terdesak atau melalui pilihan. Mereka menerima keanggotaan dan kesetiaan baru, bahasa dan norma sosial yang baru, dan membentuk persatuan baru untuk membela kepentingan mereka. Pada prinsipnya, *malakok* bertujuan untuk membina hubungan yang harmoni dan saling memberikan pertolongan dengan sesama anggota suku. Dengan *malakok* maka pendatang diterima sebagai anggota suku.

Kata “suku” di Minangkabau mengandung pengertian yang berbeda dari *clan* (bahasa Inggris) atau *stamp* (bahasa Belanda), maupun dari makna *marga* di daerah Batak dan di Sumatera Selatan. *Clan* dan *stamp* tidak menggambarkan pengertian

berdasar ikatan darah dari pihak ibu, sedangkan *marga* merupakan pengelompokan berdasar daerah asal. Adapun *suku* di Minangkabau mengandung pengertian genealogi yang dilihat dari keturunan ibu, karena itu lazim disebut *matrilineal*. Pada prinsipnya, suku ialah kesatuan masyarakat, di mana para anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari ibu yang melahirkan mereka. Orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain merasakan dirinya *badunsak* (besaudara). Hubungan erat itu tidak hanya karena mereka sesuku, dengan orang yang sukunya senama walaupun penghulunya berbeda mereka juga merasa mempunyai hubungan persaudaraan (Amir, 2004:67).

Orang sesuku mempunyai rasa persatuan dan kesetiakawanan yang kuat. Seorang anggota suku ikut bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh anggota sukunya. Hal ini dinyatakan dalam ungkapan *sehina semalu, sesakit sesenang; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*. Orang yang sesuku dinamakan *badunsanak* (bersaudara), atau dinamakan juga *sekaum*. Ikatan batin di antara sesama anggota suku sangat kuat karena:

- a. orang yang sesuku dianggap seketurunan; setiap anggota suku dianggap “kemenakan” dari penghulu yang memimpin suku tersebut. Penghulu selaku “mamak” dari para anggota suku berusaha melindungi, dan membimbing kemenakan hingga kemenakan itu mandiri. Sebaliknya, kemenakan mesti pula pandai *bercepat kaki, beringan tangan* menyelenggarakan dan memikul segala “buruk baik” yang terjadi dengan mamaknya itu.
- b. orang sesuku *seberat seringan, sesakit sesenang*. Setiap anggota suku merasa senasib dan menyatu dengan seluruh anggota sukunya. Mereka mempunyai sifat setia kepada seluruh anggota suku, saling membantu, saling membela, dan saling berkorban untuk sesama anggota suku.
- c. orang yang sesuku *sehina semalu*. Anggota suku yang melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh suku; malu seorang malu bersama. Jika seorang anggota suku dipermalukan, maka seluruh anggota suku ikut merasa terhina, karena itu mereka akan bersikap aktif membela dan mempertahankan nama baik suku mereka. Bahkan, kalau terjadi konflik dengan pihak luar, suku dan anggota suku terpaksa dan mesti memilih, maka mereka akan memihak kepada

sukunya atau *dunsanaknya*. Dalam keadaan semacam ini, anggota suku Minangkabau sama fanatiknya dengan orang Inggris: “*right or wrong is my country: right or wrong is my dunsanak*”

d. orang sesuku *sepandam seperkuburan*. Untuk menunjukkan orang sesuku maka sebuah suku mempunyai pandam perkuburan sebagai tempat berkuburnya anggota suku tersebut. Orang yang tidak sesuku atau “orang luar” tidak dibenarkan untuk dikuburkan di pandam perkuburan suku tersebut (Amir, 2004:67-68).

Melalui kegiatan *malakok* maka pendatang diperlakukan sama dengan anggota suku yang menerimanya, sesuai pepatah berikut: *ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sehina semalu*. Sebaliknya, pendatang baru itupun berkewajiban menyelenggarakan dan memikul *buruk baik* yang terjadi dengan anggota suku dimana ia *malakok* itu, sehingga bertambah eratlah hubungan di antara pendatang dengan “tuan rumah”.

Orang yang *malakok* akan mempunyai keselarasan pandangan hidup yang dapat dilihat dari identitas dan etos mereka yang hampir sama dengan tuan rumah, *batas etnik* mereka tipis, mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas persatuan, dan hubungan mereka terbina dengan baik. Oleh karena itu, tercipta hubungan yang harmonis dan saling memberikan pertolongan. Pada akhirnya terbina integrasi sosial di tengah masyarakat.

D. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Pandangan hidup masyarakat Minangkabau dikenal dengan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Pandangan ini mencerminkan realita masyarakat yang religius dan memegang sendi-sendi kehidupan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama (Islam) yang dianut oleh mayoritas penduduk. Nilai-nilai budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun tersimpan dalam berbagai kata bijak yang disampaikan kepada anak dan kemenakan. Sebagai contoh jika seorang akan merantau diberi nasehat yang berbunyi: *dima bumi dipijak, di situ langik dijunjuang; kok manyauak di hilia-hilia, bakato di bawah; mamak ditinggakan, mamak dicari, induak samang cari dahulu*". Makna yang tersirat dalam kata-kata bijak itu agar seseorang yang pergi ke suatu tempat hendaklah menjadi orang yang bisa menyesuaikan diri dengan

situasi masyarakat yang baru ditempati. Nasehat ini merupakan harapan terhadap siapa saja yang menjadi pendatang di tempat baru.

Fenomena ini yang terlihat di enam kabupaten/kota yang ditemui. Di tempat tersebut (Solok, Pesisir Selatan, Pasaman, Dharmasraya, Sawahlunto, kecuali Bukittinggi) setiap pendatang di daerah baru yang ditempatinya diharapkan oleh masyarakat nagari memiliki mamak dari suku yang ada di tempat dia tinggal. Kebiasaan ini berlaku untuk semua pendatang baik dari etnik Minangkabau atau etnik lain. Bahkan pada daerah tertentu (Kecamatan. Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dan Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan) telah menerapkan satu aturan bahwa pendatang yang menjadi transmigran harus memilih salah satu suku yang ada di Minangkabau sebagai tanda mereka menjadi saudara dari orang Minangkabau. Sebutan yang lazim digunakan untuk menunjukkan fenomena ini adalah *malakok* yaitu setiap pendatang di daerah baru adalah saudara dari penduduk setempat. Dengan demikian suku bangsa pendatang akan menjadi bagian dari masyarakat di daerah baru.

Malakok dapat dilakukan oleh pendatang secara perorangan dan dapat pula secara berkelompok. Misalnya, sekelompok etnik Jawa yang bertransmigrasi ke Provinsi Sumatera Barat, mereka dapat *malakok* secara bersama-sama kepada salah seorang penghulu (atau kepada beberapa orang penghulu kalau jumlah transmigran itu banyak) di kawasan pemukiman mereka yang baru itu. Kenyataan ini terlihat pada daerah transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Malakok bagi transmigran di Dharmasraya dijadikan sebagai kebijakan pemerintah nagari. Sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kebijakan ninik mamak (tokoh informal dalam masyarakat). Namun di kedua tempat tersebut proses *malakok* masih perlu sosialisasi lebih intensif karena bagi masyarakat pendatang (transmigran) belum melihat pentingnya *malakok* dalam kehidupan mereka (wawancara dengan pendatang di Dharmasraya dan Pesisir Selatan). Sedangkan dilihat dari segi kalangan tokoh masyarakat *malakok* bagi pendatang dianggap penting agar pendatang menjadi bagian anak kemenakan dalam nagari. Jika terjadi konflik atau

permasalahan dalam masyarakat maka penyelesaiannya akan sejalan dengan filsafat adat: "*bajanjang naiak batanggo turun*": maksudnya penyelesaian terbaik adalah dimulai dari kalangan ninik mamak.

Malakok sebagai proses perorangan hampir terjadi pada semua daerah. Biasanya proses ini terjadi pada seseorang yang pindah ke suatu tempat dan tinggal di tengah-tengah masyarakat asli. Secara otomatis orang tersebut merasa perlu untuk menyatukan diri dengan masyarakat asli, maka proses *malakok* pada salah satu suku yang seolah merupakan keharusan tidak tertulis yang harus dipenuhi oleh pendatang. Proses ini seolah berjalan alamiah dan terjadi tanpa ada paksaan. Hal ini terjadi pada hampir semua daerah Minangkabau, sehingga berlaku filsafat masyarakat "*dima bumi dipijak di situ langik dijunjuang, dima rantiang dipatah disitu aia disauak*". Artinya masyarakat pendatang sudah menjadi bagian masyarakat asli: di mana dia berada disitulah saudaranya dan kehidupannya, orang yang berada disekitarnya itulah saudaranya. Konsekuensinya seluruh tata kehidupan masyarakat pendatang dan asli berjalan selaras dan serasi. Baik dilihat proses model *malakok* individual maupun kelompok mengandung implikasi terciptanya hubungan kekerabatan yang erat, sehingga proses pegayoman dan sekaligus pengawasan dapat berlangsung sejalan dengan budaya Minangkabau *bajanjang naik, batanggo turun*".

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, daerah penelitian ini dapat dibagi kepada beberapa kategori:

1. daerah heterogen dari segi suku agama dan bahasa, namun masyarakat asli masih kuat memegang adat (Bukittinggi, Kenagarian Painan, Kabupaten Pesisir Selatan),
2. daerah heterogen dengan masyarakat Minangkabau yang longgar dalam memegang adat (Kampung Jambak dan Kenagarian Simpang Ampek Kabupaten Pasaman, Desa Sikalang Kecamatan Talawi Sawahlunto, dan Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Sawahlunto),
3. daerah heterogen tetapi di kelilingi oleh masyarakat Minangkabau yang teguh dengan adat istiadat (Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya), dan

4. daerah homogen yang mayoritas masyarakat adat Minangkabau (Kabupaten Solok dan Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan, Desa Salak dan Rantih Kabupaten Sawahlunto, Kenagarian Sasak dan Kotobaru Kabupaten Pasaman).

Dilihat dari kategori daerah ini, proses dan makna *malakok* terdapat beberapa variasi. Untuk daerah kategori pertama, budaya *malakok* terjadi melalui kebijakan yang diterapkan oleh unsur pimpinan atau tokoh masyarakat dalam suatu Nagari. Pada kategori daerah ini peran Ninik Mamak (tokoh adat) tergolong kuat dan setiap pendatang diharapkan menjadi anak kemenakan dari salah satu Ninik Mamak setempat. Sementara, untuk daerah Bukittinggi, dengan heterogenitas yang paling tinggi dari daerah lain, kegiatan *malakok* itu sedikit sulit diterapkan terutama untuk pendatang non muslim (misalnya pendatang etnis Batak dan Jawa). Untuk mengatasi masalah ini, etnik non muslim itu membentuk paguyuban berbasis daerah asal seperti paguyuban Jawa dan Batak. Perwakilan paguyuban itu diikutkan dalam lembaga adat nagari. Melalui proses demikian, ninik mamak di Bukittinggi merangkul pendatang menjadi bagian masyarakat Minangkabau. Proses *malakok* terjadi dengan mudah apabila pendatang memiliki agama yang sama dengan penduduk asli. Penggunaan tanah ulayat milik etnis Minangkabau untuk kepentingan pendirian rumah ibadah non muslim merupakan sesuatu yang sulit diterima oleh masyarakat Minangkabau. Peranan ninik mamak (pemuka adat), alim ulama (pemuka agama), dan orang cerdik pandai (kaum cendekia) sangat menentukan dalam mempertahankan nilai budaya Minangkabau yang bersendi agama Islam.

Untuk daerah heterogen yang longgar dalam hal adat, proses *malakok* tidak menjadi begitu penting. Pembauran antara pendatang dengan penduduk asli dapat terjadi manakala mereka saling menghormati satu sama lain. Dalam hal ini masyarakat lebih cenderung menganggap bahwa mereka menggunakan kebiasaan yang berlaku secara nasional. Contoh masyarakat yang bersikap seperti itu adalah daerah Jambak dan Ophir di Kabupaten Pasaman Barat, dan masyarakat Kota Sawahlunto. Sebagian besar pendatang di Jambak dan Ophir merupakan etnis Jawa dan Batak, bahkan banyak juga dari kalangan etnis Minangkabau sendiri yang berasal dari luar Kabupaten Pasaman Barat melalui program transmigrasi lokal.

Pada daerah kategori ketiga (Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya), meskipun masyarakat pendatang tinggal dalam komunitas sendiri, pemerintah dan tokoh masyarakat menghendaki agar pendatang mengambil atau masuk ke salah satu suku yang mereka sukai untuk menjadi anggota suku tersebut. Dengan cara ini semua anggota masyarakat, baik pendatang maupun penduduk asli, mempunyai suku, mamak dan penghulu adat. Melalui cara ini masyarakat pendatang tidak dipandang sebagai pendatang melainkan dianggap sebagai saudara sendiri.

Pada daerah kategori keempat yakni daerah homogen seperti Kabupaten Solok, pendatang pada umumnya berasal dari daerah lain namun masih etnis Minangkabau. Para pendatang memandang bahwa *malakok* merupakan suatu kewajaran dan menjadi kebutuhan agar mereka eksis di daerah itu. Pendatang yang sudah lama bermukim di daerah Solok bahkan ada pula yang diangkat menjadi pemangku adat, sebagaimana lazimnya disandang oleh penduduk asli.

Dilihat dari fenomena *malakok* di atas, sesuatu yang unik dari konsep ini adalah adanya kesediaan dan harapan dari penduduk asli untuk menjadikan pendatang sebagai saudara, bukan sebagai orang lain. melalui cara itu, pendatang tidak merasa asing di tempat yang baru. Dilihat dari teori “identitas” dan “pengakuan” terdapat pergeseran konsep dari dua model di atas. “Identitas” dan “pengakuan” bukan emansipasi individual untuk mencari kesetaraan dan keadilan dalam pergaulan di daerah baru, juga bukan kesepakatan politik antara pemerintah dengan berbagai kelompok (Alba, 2005; Cohen, 1997) . “Identitas” dan “pengakuan” dalam proses *malakok* lebur dalam bangunan kekerabatan antara masyarakat asli dan pendatang.

Berbeda halnya jika pendatang dan penduduk asli berlainan agama. Dalam kondisi seperti itu, peran pemerintah dan pemimpin adat sangat menentukan dalam menciptakan keteraturan dan equilibrium dalam masyarakat multikultural, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah adat Minangkabau yang *bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*. Konsekuensinya berlaku hukum *di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*. Artinya setiap pendatang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan tata aturan yang sudah berlaku di tempat baru yang

ditemuinya. dalam konteks ini bukan lagi perjuangan “identitas” dan “pengakuan” melainkan sikap “tahu diri” sebagai esensi masyarakat multikultural.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik. 1978. "Identity Maintenance and Crisis of Identity in Minangkabau". In Hans Mol (editor), *Identity and Religion: International Cross Cultural Approach*. London: Saga Publication Ltd.
- Al Muchtar, Suwarna. 2004. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural dalam Era otonomi Daerah". *Mimbar Pendidikan*. Jurnal Pendidikan UPI. Tahun XXIII No 4. 2004.
- Alba, R. 2005. "Bright vs Blurred Boundaries: Second Generation Assimilation and Exclusion in France, Germany, and the United States". in *Ethnic and Racial Studies* Vol. 28 No. 1 January.
- Amir M.S. 2004. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Badan Pusat Statistik 2016. *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka*. Katalog: 1102001.13
- Cohen, R. 1997. "Fuzzy Frontiers of Identity: The British Case". in *Social Identities*. 1(1): 35-62.
- Durkheim, E. 1964. *The Division of Labor in Society*. Translated by Joseph Ward Swain. New York: Free Press.
- Eriyanti, Fitri. 2007. "Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau". Dalam *Jurnal Demokrasi* Vol VI No 2 Tahun 2007.
- Eriyanti, Fitri. 2004. "Integrasi Sosial Suku Bangsa Batak Mandailing dengan Minangkabau di Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Batang Anai". (*Thesis Master*, Tidak Diterbitkan). Universitas Negeri Padang. Padang.
- Moeis, Isnarmi. 2014. *Pendidikan Multikultural Transformatif*. Padang: UNP Press.
- Ritzer, George & Barry, Smart. 2011. *Handbook Teori Sosial (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Sobary, Mohammad. 2003. "The Politics of Recognition and the Idea of Tolerance in Multicultural Societies. *Masyarakat Indonesia. Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XXIX. No. I. 2003. Jakarta: LIPI.
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. paper at 3th International Symposium of "Rebuilding Indonesia a Nation of "Unity in Diversity" Towards a Multicultural Society". Bali 16-18 July 2002.
- Wanandi, Sofyan. 17 Juni 2006. "Sambutan Perwakilan Warga Tionghoa" pada Acara Pembukaan *Konferensi dan Workshop Internasional "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930an s/d 1960an*. Padang. 18-21 Juni 2006.

- Watson, C.W. 2000. *Concept in Social Sciences: Multiculturalism*. Philadelphia: Open University Press.
- Wiranto. 1999. *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.